

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan guna meningkatkan pelayanan publik. Upaya pemerintah guna memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dikenal dengan *e-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) (Arief & Abbas, 2021). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *E-government* ini diharapkan dapat membuat proses birokrasi menjadi lebih produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Pratiwi et al., 2020).

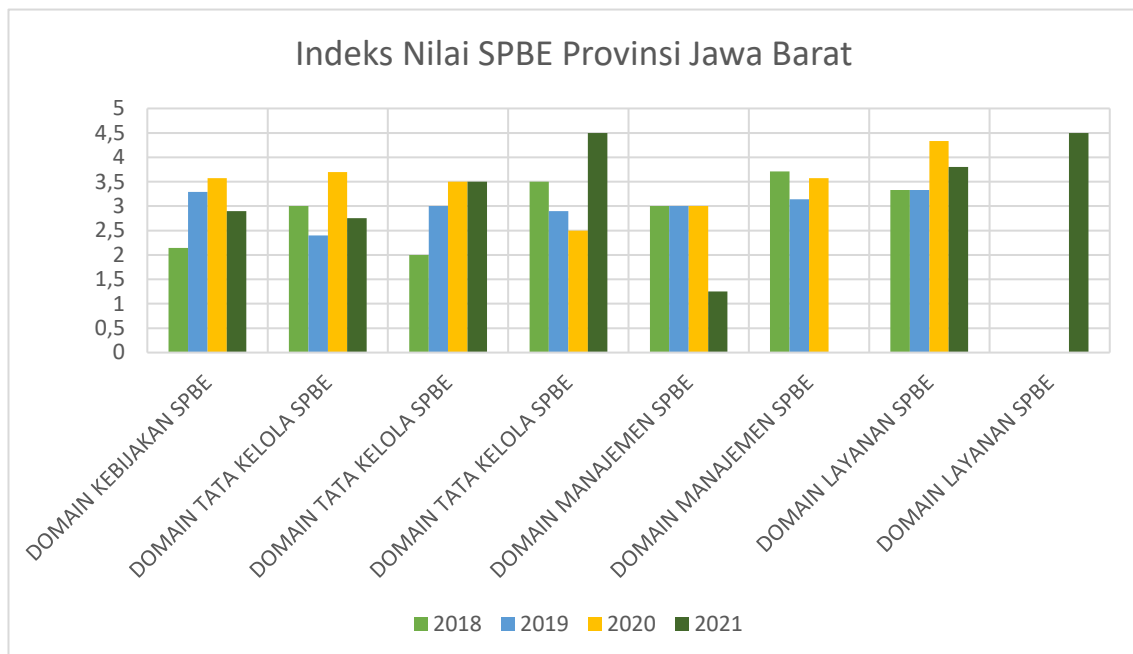
Adapun Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk penguatan aparatur negara dan reformasi birokrasi (Permenpan No. 5 Tahun 2018) terkait pedoman evaluasi Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE) merupakan kebijakan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dimana dalam hal ini diperlukan untuk melakukan evaluasi yang maksimal. Pada penggunaan SPBE ini dimaksudkan agar seluruh pemerintah daerah dan pusat dapat berbondong-bondong dalam mencapai tujuan *e-government* di Indonesia ini (Widiyarta et al., 2020).

Dalam evaluasi Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE) ini diperlukan patokan nilai dalam melakukan pengukuran kematangan pada pelaksanaannya di Instansi pusat dan Pemerintah daerah. Berikut dilampirkan indeks nilai dalam pengukuran kematangan dalam pelaksanaan Pemerintahan Elektronik (SPBE) yang bersumber dari Permen PAN & RB No.59 Tahun 2020 pada Tabel I-1.

Tabel I-1 Predikat Penilaian SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Menurut Laporan SPBE Provinsi Jawa Barat didapatkan hasil penilaian Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE) tahun 2021 pada provinsi Jawa Barat menunjukkan indeks akhir 3,28. Indeks nilai ini menunjukkan hasil yang “Baik”. Namun ini belum menunjukkan indeks yang diinginkan yaitu “Sangat Baik”. Maka dari itu masih perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan nilai SPBE agar mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu hal yang dilakukan adalah mengembangkan arsitektur dan peta rencana SPBE yang lengkap serta menyeluruh. Diperoleh data melalui laman *website opendata.jabarprov.go.id* tahun 2021 dimana dipaparkan indeks SPBE pada Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebagaimana pada Gambar I.1.



Gambar I.1 Nilai SPBE Provinsi Jawa Barat

Gambar I.1 nilai SPBE pada pemerintahan Provinsi Jawa Barat tahun 2021 diketahui memiliki domain Kebijakan SPBE, domain Tata Kelola SPBE, domain Manajemen SPBE serta domain Layanan SPBE mengalami penurunan. Maka dari itu, dapat dikatakan pemerintahan Jawa Barat belum mencapai indeks “sangat baik”.

Salah satu organisasi perangkat daerah di Jawa Barat yang juga menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) didapatkan pada laporan SPBE Provinsi Jawa barat bahwa hasil Evaluasi

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 yang dilakukan oleh KemenPANRB dan mengacu pada PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE menghasilkan nilai indeks sesuai pada Tabel I-2.

Tabel I-2 Nilai Indeks SPBE Provinsi Jawa Barat

Tahun 2021		
Nilai Indeks SPBE Provinsi Jawa Barat		3.28
Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	2.90
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2.90
Domain 2	Tata Kelola SPBE	3.40
Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE	2.75
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.50
Aspek 4	Penyelenggara SPBE	4.50
Domain 3	Manajemen SPBE	1.18
Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE	1.25
Aspek 6	Audit TIK	1.00
Domain 4	Layanan SPBE	4.08
Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.80
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik	4.50

Sumber: Laporan Kajian Evaluasi Implementasi dan Strategi Optimalisasi

Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2022

Sesuai dari Tabel I-2 mengenai indeks SPBE Provinsi Jawa Barat didapatkan nilai pada tahun 2021 adalah 3,28 termasuk kategori predikat SPBE “Baik”. Indeks tersebut belum mencapai nilai indeks “Sangat Baik” sesuai dengan nilai indeks SPBE Nasional maka dari itu perlu dilakukan peningkatan nilai SPBE tersebut. Guna mewujudkan misi ke lima Bapenda yang terdapat pada Rencana Strategis (Renstra) yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota maka hanya akan difokuskan pada domain dua aspek dua berupa Tata Kelola SPBE pada aspek Perencanaan Strategis SPBE dengan nilai 2,75 dengan predikat kategori SPBE “Baik” yang mana belum menyentuh predikat “Sangat Baik” dan domain empat aspek tujuh berupa Layanan SPBE pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan nilai 3,80 dengan predikat kategori SPBE “Sangat Baik” yang mana masih dapat ditingkatkan untuk mendapatkan predikat indeks “Memuaskan”.

Guna meningkatkan indeks predikat SPBE tersebut BAPENDA mempunyai dua indikator keberhasilan yaitu optimalisasinya pengelolaan pendapatan daerah dan optimalisasinya pelayanan publik. Dari dua indikator tersebut dibantu dengan penyusunan peta proses bisnis yang harus terintegrasi dengan layanan serta bidang yang terdapat pada BAPENDA untuk mendukung predikat indeks SPBE tersebut mencapai targetnya. Terdapat empat bidang yang pada BAPENDA yaitu Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, Bidang Pengelolaan Pendapatan, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, serta Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan.

Pada penelitian ini akan membahas terkait Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan yang memiliki empat sub kegiatan yaitu perencanaan dan pengelolaan pajak daerah, analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah, penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Setiap sub kegiatan tersebut belum mencapai target seratus persen sesuai yang di targetkan oleh BAPENDA dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Oleh karena itu, dengan adanya inovasi perbaikan atau pembaharuan pada pelayanan tiap sub kegiatan pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan maka dapat membantu bidang tersebut dalam mencapai target realisasinya. Dengan tercapainya target realisasi tersebut maka akan membantu BAPENDA dalam mencapai target nilai indeks SPBE yang diinginkan yaitu predikat sangat baik.

Solusi yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan penerapan SPBE tersebut, yaitu membuat perancangan *Enterprise* arsitektur yang mendefinisikan arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur layanan yang dapat menghasilkan pemetaan peta proses bisnis, keterkaitan layanan serta bidang pada BAPENDA, dan integrasi antar aplikasi serta dilakukan juga perancangan *Enterprise* arsitektur hingga membuat rancangan kerja guna menjadi acuan strategi BAPENDA yang digunakan untuk pengembangan dan pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik yang efisiensi dan efektivitas pada BAPENDA.

Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan maka penelitian ini difokuskan pada perancangan

Enterprise arsitektur menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA, pada tabel nilai indeks SPBE BAPENDA Provinsi Jawa Barat domain dua aspek dua ‘Tata kelola SPBE aspek Perencanaan Strategis SPBE’ dan domain empat aspek delapan ‘Layanan SPBE aspek layanan layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Berbasis Elektronik’.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi bahan kajian pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perancangan Arsitektur *Enterprise* pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat?”
2. Bagaimana perancangan IT *Roadmap* pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Menghasilkan rancangan Arsitektur *Enterprise* pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat guna meningkatkan indeks nilai SPBE Provinsi Jawa Barat.
2. Melakukan perancangan IT *Roadmap* pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat.

I.4 Batasan Penelitian

Batasan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Perancangan Arsitektur *Enterprise* menggunakan TOGAF ADM sesuai dengan Surat Edaran Menteri PAN & RB No.18 Tahun 2022 mengenai Arsitektur SPBE pada lingkup Instansi Pemerintahan Daerah yaitu Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Jawa Barat pada fase *preliminary*, fase *architecture vision*, arsitektur proses bisnis, arsitektur layanan, arsitektur data dan informasi, arsitektur aplikasi, *opportunities and solutions*, dan *migration planning*.

2. Perancangan Arsitektur *Enterprise* berfokus untuk menaikkan indeks penilaian SPBE melalui Badan Pendapatan Daerah untuk mencapai indeks “Sangat Baik”.

I.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Memberikan masukan terkait perancangan Arsitektur *Enterprise* kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat sesuai dengan tujuan BAPENDA dan Surat Edaran Menteri PAN & RB No.18 Tahun 2022.
2. Memberikan manfaat sebagai bahan referensi penulis untuk melakukan analisis serta perancangan Arsitektur *Enterprise* pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.